

Berdirinya Organisasi Kemiliteran pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945)

Made Darme^{1(*)}, Umasih²

Magister Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

*madedarme.me@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain and analyze the establishment of military organizations during the Japanese occupation of Indonesia and the process of forming popular organizations that led to the achievement of Indonesian independence. The method used in this study is the historical method, which includes heuristics, criticism (internal and external), interpretation, and historiography. The focus of this article is to discuss the establishment of youth organizations during the Japanese occupation, semi-military organizations, and military organizations. The results of this study indicate that the organizations established by the Japanese occupation, specifically Indonesia, were an effort to assist the Japanese in the war against the Allies. The most important main role in the participation of military organizations was the youth group. They were considered capable of helping to increase the manpower of soldiers against the Allies so that young men joined military organizations as war reserves when needed by Japan. However, the bitter defeat suffered by Japan against the Allies. In the end, Japan surrendered unconditionally on August 14, 1945. Japan's defeat brought Indonesia free from colonialism for three and a half centuries after Soekarno proclaimed the Proclamation of Indonesian Independence on August 17, 1945.

Keywords: *Japanese Occupation, Military, Three A Movement*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis berdirinya organisasi kemiliteran pada masa pendudukan Jepang di Indonesia dan proses terbentuknya organisasi kerakyatan yang berujung tercapainya kemerdekaan Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sejarah, yang meliputi heuristik, kritik (intern dan ekstern), interpretasi, dan historiografi. Fokus pada artikel ini membahas berdirinya organisasi kepemudaan masa pendudukan Jepang, organisasi semi-militer, dan organisasi militer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi-organisasi yang didirikan oleh pendudukan Jepang, khusus Indonesia sebagai upaya untuk membantu peperangan Jepang dalam melawan Sekutu. Peran utama paling penting dalam keikutsertaan organisasi kemiliteran adalah golongan pemuda. Mereka dianggap mampu membantu menambah tenaga keprajuritan perang melawan Sekutu, sehingga pemuda-pemuda yang mengikuti organisasi kemiliteran sebagai cadangan perang apabila dibutuhkan oleh Jepang. Akan tetapi, kekalahan pahit yang dialami Jepang terhadap Sekutu. Pada akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat tertanggal 14 Agustus 1945. Kekalahan Jepang membawa Indonesia bebas dari penjajahan selama tiga setengah abad, setelah Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Kata kunci: *Pendudukan Jepang, Kemiliteran, Gerakan Tiga A*

PENDAHULUAN

Pada 8 Maret 1942, kolonial Belanda secara sepenuhnya telah taklukkan oleh Jepang. Karena kemenangan telah diambil alih, maka Belanda akhirnya meninggalkan Indonesia. Peralihan masa kekuasaan Belanda ke masa pendudukan Jepang merupakan suatu catatan masa kelam bagi bangsa Indonesia (Yuren & Hardi, 2021). Penderitaan terus berlanjut dialami masyarakat Indonesia, walaupun penjajahan yang dilakukan antara kedua negara tersebut berbeda namun corak perlakuan yang diberikan memiliki dampak positif maupun negatif. Dengan jatuhnya kekuasaan Indonesia di tangan Jepang, maka wilayah satu persatu telah dikuasai secara menyeluruh Nusantara (Dahlan, 2017). Kemudian daerah-daerah yang strategis dibentuk sebagai pertahanan dan keamanan bagi Jepang, sejak saat itulah Indonesia menjadi bagian kolonisasi Jepang. Kemunculannya menjadi negara kuat di Asia. Mereka pun memiliki cita-cita besar sebagai negara pemimpin “Asia Timur Raya” (Fadli & Kumalasari, 2019; Sholeha & Setiawati, 2019).

Kondisi ini berdampak mengarahnya pada sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagaimana Jepang menjajah lebih fasis dibandingkan Belanda. Berbagai kekuasaan Jepang dalam menguasai negara-negara dilakukan dengan cara ekspansi politik dan perang. Tentunya untuk menaklukkan koloninya dengan bantuan kemiliterannya. Artinya kemiliteran merupakan sebuah alat organisasi pada sebuah negara dalam pemerintahan sebagai pertahanan negara dari serangan asing. Hal ini berimbas pada wilayah Indonesia yang telah berada pada kekuasaan pendudukan Jepang (Hudaidah & Karwana, 2021; Santi et al., 2016).

Berbeda pada zaman kolonial Belanda pembentukan pemerintahan sipil hanya terdapat dua, namun kependudukan Jepang memiliki tiga pemerintahan militer, yang meliputi Militer Angkatan Darat (kedua puluh lima) bagian wilayah Sumatra berpusat di Bukit Tinggi, Angkatan Darat (keenam belas) bagian wilayah Jawa dan Madura berpusat di Batavia, dan Angkatan Laut bagian wilayah Kalimantan Timur berpusat di Ujung Pandang (Muhajir et al., 2021). Dari terbentuknya kemiliteran setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda, seperti Pulau Jawa digunakan sebagai wilayah politik yang paling maju, oleh karena sumber daya manusia melimpah. Alasan inilah wilayah Jawa berperan penting dalam kesadaran nasional terhadap kebijakan Jepang dibandingkan dari kedua wilayah lainnya (Yasmis, 2007).

Masa pendudukan Jepang adalah suatu periode penting dalam catatan sejarah bangsa Indonesia. Perubahan yang paling mendasar terjadi pada kehidupan masyarakat pedesaan. Oleh karena, Jepang melancarkan gagasannya mengarah kepada masyarakat desa-desa. Mereka yang belum memiliki pengetahuan sehingga mudah dipengaruhi dengan mudah oleh Jepang. Untuk melancarkan rencananya, Jepang membentuk organisasi pedesaan dengan melibatkan langsung pada lembaga-lembaga sosial maupun politik. Contohnya koperasi dan rukun tetangga menjadi wadah untuk menampung pemuda-pemuda desa. Dalam menjalin hubungan tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kepala Desa, apalagi perlakuan yang diberikan sedikit lebih baik sebagai perwakilan pemerintahan Jepang (Perdana, 2010).

Untuk mendapatkan dukungan maupun simpati dari masyarakat Indonesia, maka tokoh-tokoh nasionalis diangkat menjadi pemimpin pergerakan organisasi yang didirikan oleh Jepang. Gerakan-gerakan yang didirikan adalah Gerakan Tiga A (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia) dan gerakan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA). Pemerintah Jepang dalam memberikan perhatian kepada masyarakat Indonesia, ditujukan pada golongan para pemuda. Oleh karena, mereka kebanyakan berasal dari kalangan sosial yang

berbeda-beda setiap wilayah, seperti bertempat tinggal di kota ataupun desa. Selain itu, pendidikan yang didapatkan dari mereka belum memadai sepenuhnya. Contohnya pernah menduduki sekolah menengah, bahkan ada juga yang berpendidikan hanya lulus sekolah dasar. Alasan pemerintah Jepang memilih golongan pemuda karena mereka memiliki sifat yang gigih, semangat tinggi, dan beridealisme. Keadaan inilah yang memudahkan Jepang dalam mempengaruhi golongan muda sebagai sasaran utamanya (Poesponegoro & Notosusanto, 1984:32; Yasmis, 2007).

Menurut Ishak (2012) menyatakan sistem penjajahan Jepang di Indonesia berbeda dari penjajahan sebelumnya. Jepang menguasai Indonesia sebagai suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan pada Perang Dunia II. Dalam kekuasaannya membagi wilayah Indonesia menjadi tiga bagian, yaitu Jawa, Sumatra, dan Makassar. Ketiga daerah tersebut dijadikan sebagai letak strategis secara politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Menurut Munawaroh et al. (2022) mengemukakan pergerakan Jepang dalam menguasai pendudukan Indonesia yang menjadi pengaruh utamanya berasal dari golongan pemuda. Mereka dibentuk dengan budaya karakter militer yang dimiliki Jepang bernama *Bushido* (semangat dan pekerja keras). Tujuan dari pengerahan pemuda untuk membentuk golongan muda menjadi karakter yang ulet, tangguh, dan disiplin yang tinggi. Sebagaimana nantinya mengarah kepada persiapan terhadap medan pertempuran di Perang Dunia II.

Berkaitan penelitian tentang pendudukan Jepang di Indonesia bukan suatu penelitian yang baru dilakukan, namun penelitian ini telah dikaji oleh beberapa peneliti lain. pertama, penelitian oleh Fadli dan Kumalasari (2019) mengemukakan bahwa pada masa pemerintahan Jepang selama tiga setengah abad menerapkan suatu pemerintahan tiga kemiliteran di daerah Indonesia, yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Makassar. Kebijakan Jepang dibentuk sebagai upaya untuk mendominasi wilayah-wilayah penting yang akan dijadikan proyek pembangunan di bidang perekonomian. Hal ini juga untuk menompang persiapan perang Jepang dalam menguasai Asia Timur dan Tenggara. Kedua, penelitian oleh Okcavia et al. (2022) menjelaskan bahwa pada masa pendudukan Jepang di Indonesia telah membentuk organisasi bernama Pembela Tanah Air (PETA). Organisasi ini bertujuan untuk mendukung kepentingan nasional milik Jepang, sebagaimana mereka membentuk suatu pertahanan dalam melawan serangan dari Sekutu. Terbentuknya PETA juga sebagai bela negara untuk melawan penjajahan dengan menggunakan kemampuan fisik dan metalnya dari ajaran militan Jepang. Ketiga, penelitian oleh Praditya dan Sunarti (2022) menyatakan bahwa masa pendudukan Jepang selama tiga setengah abad (1942-1945) telah membentuk berbagai kebijakan yang sewenang-wenang untuk masyarakat Indonesia. Kebijakan tersebut bukan sifatnya hanya berdampak buruk, namun juga mengarah ke positif. Seperti halnya pada masa pendudukan Jepang pemuda menjadi komponen penting dalam personel militer yang memiliki potensi tertinggi. Begitu pula terhadap perempuan mengalami pergeseran makna. Sosok perempuan beralih menjadi sosok yang kuat dan bersenjata, bukan hanya sebatas bekerja di dapur saja.

Uraian pembahasan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan keberadaan organisasi masa pendudukan Jepang telah memberikan warna kehidupan yang lebih baik dari masa penjajahan kolonial Belanda. Kondisi ini terlihat pada pembentukan organisasi militer yang didirikan oleh Jepang. Pengemasan lebih lanjut akan dijelaskan pada bagian pembahasan artikel, maka tujuan pada penelitian ini pertama untuk menjelaskan berdirinya organisasi kemiliteran pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945. Kedua, menganalisis proses

terbentuk organisasi kerakyatan yang berujung pada tercapainya kemerdekaan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan kajian dengan menggunakan metode sejarah. Sebagai acuan utama dalam penelitian ini mengikuti empat langkah penelitian, yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan sumber-sumber data yang berasal dari buku, jurnal, dokumen, dan laporan-laporan yang berkaitan pada penelitian ini. Sumber sekunder pada penelitian ini menggunakan buku berjudul “Sejarah Lengkap Indonesia: Era Klasik hingga Terkini”, “Sejarah Indonesia Modern”, dan “Sejarah Nasional Indonesia VI”. Sumber utama peneliti menggunakan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah sumber terkumpulkan, kemudian peneliti melakukan sebuah kritikan secara intern ataupun ekstern. Dalam kritik intern dilakukan untuk mengetahui setiap kredibilitas sumber-sumber yang ditemukan, baik dari buku maupun jurnal. Sedangkan kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui keabsahan maupun keautentikan sumber yang diperoleh, seperti tahun penerbitan penggunaan sumber rujukan penelitian ini. Langkah selanjutnya interpretasi data yang telah tersedia dengan hasil temuan dapat dipertanggungjawabkan dari keilmiahannya. Peneliti melakukan interpretasi data untuk menghubungkan fakta-fakta mengenai organisasi kemiliteran yang dibentuk semasa kolonisasi Jepang di Indonesia. Langkah terakhir, peneliti melakukan penyusunan laporan hasil data yang telah dirangkum atau diistilahkan historiografi. Sebagaimana melakukan penyusunan kerangka berpikir berdasarkan langkah-langkah penulisan sejarah secara kronologis, mulai dari awal masuk Jepang hingga akhir masa pendudukan di Indonesia (Irwanto & Sair, 2014:57-160).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdirinya Organisasi Kepemudaan Masa Pendudukan Jepang

Jepang mendirikan organisasi kemiliteran bukan berarti untuk kepentingan bangsa Indonesia, namun mengarahkan pada tujuan penting dari misi nasional milik Jepang. Hal ini berlatar belakang pada keinginannya untuk menguasai seluruh wilayah bagian Asia Timur dan Asia Tenggara. Mereka melakukan ekspansi besar-besaran dengan cara melihat kondisi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perang melawan Sekutu. Melihat kondisi Indonesia yang telah dijelajah oleh orang Jepang, berbagai daerah memiliki sumber kekayaan mumpuni untuk dijadikan kebutuhan perang. Maka, potensi daerah yang memiliki letak strategis digunakan sebagai tempat kemiliteran dalam pertahanan dan keamanan negara.

Lokasi daerah yang telah berhasil dikuasai oleh Jepang. Kemudian jajahan kolonial Belanda sepenuhnya dikuasai pendudukan Jepang. Tujuan untuk menanamkan pengaruh pola pikir yang dibentuk pemerintahan militer Jepang terhadap masyarakat Indonesia. Pendirian militer di Indonesia yang dibentuk di tiga wilayah, yang meliputi Pulau Sumatra, Jawa, dan Makassar. Ketiga daerah yang didirikan militer memiliki tujuan yang berbeda-beda (Desiyana et al., 1945). Terdapat tiga tujuan utama pendudukan Jepang di Indonesia, pertama Indonesia sebagai daerah penghasil dan penyuplai bahan mentah serta baker yang penting untuk industri Jepang. Kedua, Indonesia sebagai tempat pemasaran dalam industri Jepang. Oleh karena, jumlah penduduk Indonesia sangat melimpah. Ketiga, Indonesia sebagai tempat untuk memperoleh tenaga buruh yang lebih banyak dengan upah diberikan sangat relatif murah (Sudirman,

2014:284).

Untuk menarik simpati dari masyarakat Indonesia, sebagaimana membantu Jepang untuk melancarkan tujuannya pada Perang Pasifik. Maka, Jepang melakukan proganda seperti mengemukakan “Jepang-Indonesia sama-sama orang Asia” dan “Gerakan Tiga A”. Pengaruh paling diperhatikan ditujukan kepada golongan muda sebagai gerakan penuh ambisi dan belum dipengaruhi oleh pemikiran barat. Sehubungan dengan sifat kaum muda itu, maka pelajaran yang ditekankan kepada mereka adalah *seishin* (semangat) atau *bushido* (jiwa ksatria) yang meliputi kesetiaan dan bakti kepada tuan atau pemimpinnya. Tentunya pola ini dibentuk sebagai upaya penekanan kedisiplinan dan diberantaskan rasa rendah diri, serta semangat budak.

Pengaruh yang paling menonjol diberikan Jepang terhadap kalangan pemuda adalah sarana pendidikan. Jepang menerapkan dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan umum dan khusus. Pendidikan umum merupakan sebuah pendirian jenjang sekolah pada tingkat Sekolah Dasar (Sekolah Rakyat) dan Sekolah Menengah. Sedangkan pendidikan khusus merupakan jenjang pendidikan yang diberikan hanya bersifat latihan-latihan kemiliteran. Pelatihan kemiliteran ini dibentuk agar masyarakat Indonesia khususnya pemuda menanamkan rasa semangat dengan pro-Jepang. Pembentukan latihan kepemudaan ini bernama *Barisan Pemuda Asia Raya* (BPAR). Awal berdirinya di tingkat pusat Jakarta, namun di daerah-daerah juga dibentuk *Komite Penginsafan Pemuda*. Komite ini beranggotakan dari unsur kepanduan. Berdasarkan pembentukannya bersifat lokal dengan menyesuaikan pada situasi maupun kondisi pada daerah masing-masing. Peresmian BPAR pada tingkat pusat tertanggal 11 Juni 1942, Slamet Sudibyo dan S.A. Saleh dipilih sebagai pemimpin. Perlu disadari bahwa BPAR merupakan anak daripada Gerakan Tiga A, namun kepopuleran organisasi BPAR melebihi dari induknya. Program BPAR yang diikuti oleh pemuda diharuskan berlatih selama tiga bulan. Mereka sebagai peserta organisasi BPAR diwajibkan memiliki rasa semangat, keyakinan, dan kemauan. Sebagaimana harapan dari organisasi ini untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan bagi pemuda-pemuda lainnya. Untuk menjadi anggota BPAR tidak dipersyaratkan apapun, artinya siapa saja boleh mengikuti BPAR dalam memasuki latihan tersebut. Dengan demikian, Jepang mempermudah pemuda memasuki organisasi kepemudaan agar mereka memiliki keyakinan bahwa berdirinya organisasi bukan untuk kepentingan nasional Jepang, melainkan untuk melahirkan seorang pemimpin yang memiliki jiwa ksatria. Maka lahirnya seorang pemimpin mampu untuk menjaga tanah air bangsanya sendiri sehingga dapat mengusir penjajahan dari bangsa lain (Ricklefs, 2007:306).

Organisasi Semi-Militer

Masa Pendudukan Jepang di Indonesia ditandai dengan adanya pembentukan organisasi pergerakan berbasis kemiliteran. Pendirian organisasi hanya semata-mata untuk mengkondisikan militer Jepang, sebagaimana wilayah koloninya semakin terdesak dari musuhnya, yaitu Sekutu. Melihat kondisi wilayahnya telah dikuasai satu persatu oleh Sekutu, maka pada tahun 1943 Jepang kemudian melancarkan jajahannya semakin intensif, baik mendidik maupun melatih golongan pemuda dalam bidang kemiliteran. Hal ini berdampak pada situasi yang menyulitkan Jepang di area medan perang Asia-Pasifik. Upaya Jepang untuk menyikapi situasi genting tersebut, kemudian melakukan konsolidasi kekuatan yang dihimpun dari golongan pemuda maupun pelajar Indonesia. Sebagai maksud untuk menambah amunisi tenaga perang yang akan diikutsertakan pada pertempuran melawan pihak Sekutu (Fadli & Kumalasari, 2019).

Dalam perayaan hari ulang tahun Kaisar Jepang pada 29 April 1943 mengumumkan bahwa

secara resmi berdirinya organisasi pemuda, bernama *Seinendan* dan *Keibodan*. Terbentuknya kedua organisasi ini dinaungi oleh *Gunseikan*. Untuk menjadi bagian anggota dari *Seinendan* tidak dibuat begitu sulit memasukinya. Awal mula yang tercatat sebagai anggotanya sebanyak 3.500 pemuda dari Pulau Jawa. Berkembang pesat sekitar 500.000 pemuda yang mengikutinya diakhir masa pendudukan Jepang. Tujuan pembentukan organisasi pemuda untuk melatih dan mendidik para golongan pemuda, sehingga mereka mampu menjaga dan mempertahankan tanah air bangsanya sendiri. Namun, dibalik dari maksud yang diutarakan bahwa pemerintah Jepang membentuk organisasi pemuda untuk mencari dan memperoleh tenaga cadangan pada saat dibutuhkan dalam memperkuat pertahanan militer Jepang.

Seseorang terdaftar sebagai anggota *Seinendan* akan diberikan berupa pelatihan kemiliteran, sebagaimana untuk mempertahankan diri maupun melakukan penyerangan. Persyaratan untuk menjadi anggota *Seinendan*, mereka telah menginjak usia 15-25 tahun, tetapi peraturan diubah menjadi 14-22 tahun. Organisasi pemuda ini mempunyai cabang yang meluas sampai ke pedesaan besar, akan tetapi aktif di wilayah perkotaan. Lanjut pada pemuda yang memiliki umur di atas 25-35 tahun, tetapi diubah menjadi 20-35 tahun, maka dibentuklah organisasi bernama Korps Kewaspadaan (*Keibondan*) merupakan sebuah pasukan keamanan dan ketertiban negara yang dilimpahkan oleh lembaga kepolisian, kebakaran, dan serangan udara pembantu. Persyaratan untuk menjadi bagian dari anggota *Keibodan*, meliputi semua laki-laki yang berada di desa (*ku*). Mereka akan dites secara tubuhnya apakah sehat, kuat, dan memiliki perlakuan baik. Kemenarikan dari organisasi ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, oleh karena pemuda yang mengikutinya sekitar lebih dari satu juta. Tentunya jumlah anggota *Keibodan* melebihi dari organisasi *Seinendan* (Poesponegoro & Notosusanto, 1984:32).

Tahun 1943 dipertengahan bulan dibentuk *Heiho* (Pasukan Pembantu) sebagai pasukan yang ditugaskan untuk angkatan darat dan angkatan laut Jepang. Ketertarikan pemuda mengikuti *Heiho* berjumlah sekitar 25.000, apalagi mereka ikut bergabung pada organisasi ini mendapat latihan dasar yang sama dengan pasukan sedadu Jepang. Berdirinya organisasi *Seinendan* bukan hanya diperuntukkan pada masyarakat pedesaan maupun sekolah-sekolah, namun Jepang juga memperluas sampai masuk ke perusahaan pabrik dan perumahan. Pada bulan Oktober 1944, Jepang membentuk organisasi untuk golongan perempuan bernama *Josyi Seinendan*. Dalam menyukkseskan organisasi yang telah didirikan Jepang, maka mereka memperluas organisasi *Seinendan* dari bernama *Seinen Kunrensyo* (Lembaga Latihan Pemuda) menjadi *Cuo Seinen Kunrensyo* (lembaga pusat latihan pemuda). Pusat latihan kemiliteran Jepang yang memperoleh kader-kader pimpinan *Seinendan* daerah dilatih. Keberadaan mereka pada lembaga pusat latihan pemuda mendapat pelatihan dasar namun tanpa dilengkapi persenjataan. Artinya, *Seinendan* adalah organisasi yang dibentuk sebagai barisan cadangan untuk memperkuat keamanan barisan belakang (Ricklefs, 2007:306). Dengan demikian, terbentuknya organisasi semi-militer guna membantu permasalahan yang dihadapi Jepang dalam melawan Sekutu. Maka pengerahan tenaga pemuda sebagai kekuatan cadangan apabila Jepang mengalami kekurangan pasukan dalam pertempuran perang.

Organisasi Militer

Pada bulan Oktober 1943, pemerintahan Jepang kembali membentuk organisasi pemuda bernama Pembela Tanah Air (PETA) (Okcavia et al., 2022). Peta merupakan sebuah organisasi yang dibentuk sebagai tentara sukarela untuk penduduk Indonesia. Akhir dari perang anggota Peta memiliki jumlah 37.000 orang, yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatra. Dalam bahasa

Jepang organisasi ini disebut *Giyugun*. Peta berbeda dengan *Heiho*, oleh karena mereka bukan secara resmi diangkat sebagai balatentara Jepang, melainkan sebagai pasukan pembantu yang bertujuan untuk melawan pasukan Sekutu. Selain itu pihak Jepang juga melakukan suatu pembentukan organisasi baru dengan notabennya beragama Islam. Jepang melakukan pembubaran MIAI kemudian perannya diganti oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dengan memiliki cabang-cabang setiap keresidenan Pulau Jawa. Proses menjalin hubungan ini juga dilakukan dengan mempolitisasi Islam modern perkotaan, sebagaimana sebelumnya Jepang telah mendominasi MIAI. Sehingga kepemimpinan Masyumi diserahkan kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Upaya Jepang melakukan penawaran kerja sama antara pemimpin Indonesia untuk membentuk Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA). Melalui organisasi Putera dapat membujuk kaum nasionalis dan intelektual dalam menghadapi perang melawan Sekutu, namun hasilnya nihil sehingga Jepang merasa dirugikan (Fadli & Kumalasari, 2019). Awal tahun 1944, organisasi Putera digantikan oleh gerakan rakyat baru sebagai organisasi yang dapat menjadi atap dalam memobilisasi seluruh penduduk Jawa atau disebut *Jawa Hokakai* (Persatuan Kebaktian Jawa). Persyaratan untuk menjadi anggotanya berusia 14 tahun. Ketua organisasi *Jawa Hokakai* adalah *Gunseikan*, sedangkan tokoh nasionalis yakni Soekarno dan Hasjim Asjari dilantik sebagai penasihat utama, serta Hatta dan Mansur sebagai pengelola. Tentunya pihak Jepang sendiri memiliki tujuan untuk memanfaatkan para tokoh-tokoh nasionalis dalam memajukan tujuan-tujuan yang telah diusung mereka. Akan tetapi, tokoh nasionalis pun tidak mau kalah dalam mengambil keuntungan dari pihak Jepang. Keuntungan ini langsung diambil alih oleh Soekarno dalam memanfaatkan tamannya sebagai propaganda melalui *Hokakai*. Pengaruh yang dikemukakan memperkokoh posisi Soekarno sebagai pemimpin utama kekuatan rakyat. Karena Jepang telah menguasai tokoh-tokoh Islam, maka secara tidak langsung mereka telah terikat khusus untuk priyayi yang akan diangkat sebagai ketua organisasi baru (*Hokakai*) yang dilakukan pada setiap tingkat pemerintahan. *Hokakai* juga mempunyai alat organisasi yang dapat membantu pemerintahan Jepang, yaitu *Tonari* (Rukun Tetangga). Pembentukan organisasi ini bertujuan untuk mengorganisasikan keadaan seluruh penduduk khususnya desa. Kondisi pedesaan dibuat menjadi sel-sel yang terdiri atas sepuluh sampai dua puluh kepala keluarga, sebagaimana memobilisasi, indoktrinasi, dan pelaporan. Tugas tanggung jawab dibebankan kepada penguasa-penguasa tingkat bawah dan kepala desa (Ricklefs, 2007:309).

Banyak kalangan masyarakat Indonesia mengalami kekecewaan yang diberikan oleh pemerintahan Jepang. Pengerahan pemuda yang tidak menerima peristiwa tersebut adalah anggota Peta. Mereka melakukan sebuah gerakan seperti pemberontakan Peta Blitar (Jawa Timur) pada 14 Februari. Bentuk gerakan peta juga didukung dari setengah anggota daidan. Akan tetapi, gerakan yang dikomando oleh Supriyadi dan Muradi mengalami kekalahan dari pemerintah Jepang. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Maret 1945. Mengenai pembahasan pertama dibentuknya BPUPKI dikemukakan oleh Soepomo. Ia menjelaskan bahwa unsur-unsur kehidupan bangsa Indonesia berbeda sehingga harus dibicarakan agar tercapainya keserasian antar sesama, selain itu juga melawan adanya individualisme dari perorangan. Begitu pula yang diusulkan oleh Muhammad Yamin mengenai negara baru Indonesia yang harus diklaim diantaranya Malaya, Sabah, Sarawak, Portugis Timur, dan seluruh bekas wilayah jajahan dari Hindia-Belanda.

Selanjutnya membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 9 Agustus 1945. Seorang Panglima Tentara Jepang bernama Marsekal Terauchi mengadakan sebuah pertemuan dengan memanggil Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat ke Dalat (Vietnam Selatan). Selanjutnya pada 12 Agustus 1945, Terauchi menyampaikan pesan mengenai keputusan kemerdekaan Indonesia. Setelah pertimbangan kemerdekaan Indonesia telah diputuskan, namun 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat telah mengebom Kota Hiroshima dan Nagasaki. Tentunya dari pengeboman kedua kota tersebut mengalami kehancuran bagi pemerintah Jepang, apalagi jatuhnya bom atom mengakibatkan banyaknya warga Jepang meninggal dunia. Karena melihat kondisi warga Jepang yang mengenaskan, maka kaisar Jepang menyatakan kalah tanpa syarat dengan Sekutu pada 14 Agustus 1945. Momentum inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia, namun berbagai peristiwa yang dilewati untuk dapat memproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 (Sudirman, 2014:290-291).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian data yang telah dihimpun, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdirinya organisasi kemiliteran milik Jepang di Indonesia sebagai upaya memperoleh tenaga yang lebih besar dalam pertempuran perang melawan Sekutu. Oleh karena itu, pembentukan organisasi kemiliteran kepemudaan dijadikan kekuatan tambahan di medan perang. Untuk menjadi anggota kemiliteran yang paling diutamakan adalah peran golongan muda, karena mereka memiliki jiwa yang kuat, kedisiplinan tinggi, dan berambisi besar. Pada masa mengikuti organisasi kemiliteran dibentuk sikap dengan menekankan *seishin* (semangat) atau *bushido* (jiwa ksatria). Hal ini berdasarkan kepatuhan ataupun kebaktian pada seorang pemimpin. Pada tahun 1942-1943 beberapa organisasi kemiliteran yang didirikan Jepang meliputi *Barisan Pemuda Asia Raya* (BPAR), *Seinendan*, *Keibodan*, *Heiho*, dan Pembela Tanah Air (PETA).

Lanjut tahun 1944, pemerintah Jepang kembali mendirikan organisasi, yang meliputi Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), Jawa *Hokakai*, dan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Masing-masing organisasi ini memiliki tujuan yang berbeda-beda untuk membantu usaha Jepang dalam perang melawan Sekutu. Akan tetapi pada tahun 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pembentukan lembaga tersebut sebagai upaya Jepang dalam memberikan janji kemerdekaan Indonesia. Namun, kepahitan kekalahan perang terhadap Sekutu yang dialami oleh Jepang, akhirnya membawa Indonesia pada titik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, M. H. (2017). Konfrontasi Republik Indonesia Dengan Ahead of the Entry of the Allies 1945-1946. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 9(1), 61–76. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v9i1.346>
- Desiyana, L., Syah, I., & Basri, M. (1945). Upaya Pemerintah Militer Jepang Membentuk Karakter Militansi Pejuang Bangsa Indonesia Tahun 1942-1945. *2013*, 1(2), 1–5. <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/1123>
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan

- Jepang. *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 13(2), 189. <https://doi.org/10.17977/um020v13i22019p189-205>
- Hudaidah, & Karwana, M. A. P. (2021). Pendidikan di Indonesia Masa Pendudukan Jepang. *Danadyaksa Historica*, 1(2), 97–104. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/JDH/article/view/4243>
- Irwanto, D., & Sair, A. (2014). *Metodologi dan Historiografi Sejarah: Cara Cepat Menulis Sejarah*. Eja Publisher.
- Ishak, M. (2012). Sistem Penjajahan Jepang di Indonesia. *Jurnal INOVASI*, 9(1), 1–12.
- Muhajir, A., Sumantri, P., & Gultom, A. Z. (2021). Memori Sejarah dan Warisan Pendudukan Jepang di Sumatera Timur sebagai Potensi Wisata Sejarah. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 149–158. <https://doi.org/10.30-743/mkd.v5i1.3665>
- Munawaroh, L., Sustianingsih, I. M., & Sarkowi. (2022). Pengaruh Pendudukan Jepang terhadap Perkembangan Militer Sumatera Selatan Tahun 1942-1947. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 5(2), 222–241. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i2.4319>
- Okcavia, S. C., Rudiyanto, & Suwarno, P. (2022). Pembela Tanah Air (PETA): Bela Negara Sebagai Implementasi Nasionalisme Dalam Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 579–589.
- Perdana, M. A. (2010). Pengaruh Pendudukan Jepang terhadap Masyarakat Magelang 1942-1945. *Paramita: Historical Studies Journal*, 20(2), 143–157. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/view/1046>
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Cetakan ke). PN Balai Pustaka.
- Praditya, D. W., & Sunarti, L. (2022). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Militer Jepang Terhadap Kehidupan Sosial- Militer Di Kedu-Syuu Tahun 1942-1945. *Syntax Literate: Jurnal Ilmial Indonesia*, 7(4), 4068–4077. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7-i4.6738>
- Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern* (Cet.9). Gadjah Mada University Press.
- Santi, W., Sarman, Burhan, F., & Hermina, S. (2016). Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Muna Pada Masa Pendudukan Jepang: 1942-1945. *Journal Idea of History*, 4(1), 1–23.
- Sholeha, & Setiawati, E. (2019). Pendidikan Indoneisa Pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945. *Jurnal Swarnadwipa*, 3(2), 130–141. <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/swarnadwipa/article/view/2004>
- Sudirman, A. (2014). *Sejarah Lengkap Indonesia: Dari Era Klasik hingga Terkini* (Rusdianto (ed.); Cetakan 1). DIVA Press.
- Yasmis. (2007). Jepang dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Sejarah Lontar*, 4(2), 25–26.
- Yuren, A. A., & Hardi, E. (2021). Keberadaan Romusha di Nagari Sirukam pada Masa Pendudukan Jepang. *Kronologi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 3(1), 202–211. <https://doi.org/10.24036/jk.v3i1.128>